

Kerusuhan Mei 1998: Tragedi Etnis Tionghoa di Jakarta

Anisa Rahmalia Rahayu

Universitas Negeri Semarang

E-mail: anisarahmaliaa49@students.unnes.ac.id

Abstract

After Indonesia became an independent country, not a few experiences conflicts that cause controversy. The year 1998 became one of the unforgettable years because of the riots that caused many victims and led to an attack aimed at the ethnic Tionghoa. Until now, the tragedy is still a question mark because there is no party willing to give responsibility or compensation for the riots that occurred. This paper is the result of a literature review that explains the riots that occurred in 1998 regarding the tragedy of the ethnic Tionghoa in Jakarta. The purpose of this paper is to examine how the ethnic Tionghoa tragedy in Jakarta began from the background, how the incident occurred, to the impact until now of the 1998 incident. The research method used is descriptive method. The riot that occurred 24 years ago resulted in the emergence of discrimination and bad prejudice, even the incident still brought up trauma that imprinted. Even so far, the perspective of Indonesian people on Tionghoa ethnic.

Keywords: *Tragedy 1998, Discrimination, Tionghoa Ethnic, Jakarta*

Abstrak

Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka, tidak sedikit mengalami konflik yang menimbulkan kontroversial. Tahun 1998 menjadi salah satu tahun yang tidak terlupakan akibat dari kerusuhan yang menimbulkan banyak korban dan memunculkan sebuah serangan yang ditujukan kepada etnis Tionghoa. Sampai saat ini tragedi tersebut masih menjadi sebuah tanda tanya karena tidak adanya pihak yang mau memberikan tanggung jawab maupun ganti rugi atas kerusuhan yang terjadi. Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka yang menjelaskan tentang kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tentang tragedi etnis Tionghoa di Jakarta. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu menjelaskan bagaimana tragedi etnis Tionghoa terjadi di Jakarta mulai dari latar belakang, bagaimana peristiwa itu terjadi, hingga dampak yang dirasakan sampai saat ini dari peristiwa 1998. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yaitu dengan pemeriksaan dokumen dan studi dokumen relevan. Kerusuhan yang terjadi 24 tahun silam mengakibatkan munculnya diskriminasi dan prasangka buruk bahkan memunculkan trauma yang membekas. Bahkan sampai saat ini hal tersebut masih tumbuh dalam perspektif masyarakat Indonesia terhadap etnis Tionghoa.

Kata kunci: *Tragedi 1998, Diskriminasi, Etnis Tionghoa, Jakarta*

Copyright © 2023, *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*. All right reserved

Pendahuluan

Tragedi 1998 di Jakarta ini tidak terlepas dari masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa orde baru. Saat itu perekonomian dan sistem politik dalam keadaan yang tidak stabil yang mengakibatkan adanya gejolak dari masyarakat. Keberadaan orang-orang etnis Tionghoa menurut catatan sejarah sudah ada sejak masa Dinasti Han (206 SM-220 SM), mereka melakukan perniagaan ke wilayah Asia Tenggara termasuk juga ke Indonesia khususnya daerah Jawa. Etnis Tionghoa dalam sejarah Indonesia memiliki catatan penting atas peran yang mereka berikan bahkan sebelum Indonesia merdeka (Kumala et al., 2022).

Sejak masa kolonialisme berlangsung di Indonesia, perlakuan diskriminatif tidak dapat terelakan terhadap orang-orang Tionghoa, baik dalam hal peradilan maupun hukum. Hal itu dapat dilihat dari peraturan yang dibuat Belanda pada akhir abad ke-19 yang isinya mengatur dan mengikat gerak dari orang-orang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, misalnya saja dalam hal bermukim. Selain dalam bermukim pemerintah Belanda juga mengatur perihal perizinan ketika mereka melakukan perjalanan untuk bepergian. Hal-hal yang seperti ini menjai bibit-bibit dari tindakan diskriminatif pada orang-orang etnis Tionghoa di Indonesia (Gunawan, 2020).

Melihat kebelakang pada masa orde lama yang pada saat itu Indonesia masih di pimpin oleh Soekarno, beliau mengeluarkan sebuah kebijakan yang ditujukan kepada orang etnis Tionghoa, seperti halnya pembatasan dalam hal bekerja atau bisnis, dalam lingkup pendidikan orang yang beretnis Tionghoa memiliki kesempatan yang kecil karena adanya pembatasan kuota untuk melanjutkan ke perguruan tinggi (Annisa, 2011). Dari beberapa kebijakan tersebut membuat pergerakan orang Tionghoa di Jakarta sangat terbatas, karena terbatasnya gerak mereka di Jakarta memicu terjadinya konflik.

Seperti yang kita ketahui Indonesia pada masa orde baru pernah mengalami krisis moneter yang menyebabkan kesengsaraan bagi lapisan masyarakat Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari adanya krisis moneter ini mencakup segala aspek kehidupan. Namun yang menjadi sorotan dari peristiwa tersebut adalah kerugian yang terjadi pada aspek ekonomi, sosial terutama dalam hal moral, kesehatan, dan keselamatan (I.S. Susanto, 1999). Apalagi kebijakan pada masa orde baru lebih mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang menumbuhkan adanya para penguasa konglomerat dan para korporasi yang bisa memegang kekuasaan, misalnya dalam penentuan kebijakan terkait dengan penentuan harga, pengurangan hak pekerja, persaingan tidak sehat, yang berdampak dan merugikan bagi para pelaku ekonomi. Selain itu nilai tukar rupiah yang menurun akibat krisis moneter ini berdampak pada harga kebutuhan pokok yang meningkat, pengangguran dimana-mana, angka putus sekolah yang tinggi, menggiring pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan orde baru yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Dengan berbagai polemik yang terjadi serta adanya hubungan tidak baik antara masyarakat Indonesia dengan etnis Tionghoa menjadi alasan kuat terjadinya peristiwa kerusuhan 1998. Dampak yang dirasakan orang-orang yang menjadi korban atas kejadian tersebut juga tidak main-main karena memunculkan anggapan negatif bahkan melekat sampai saat ini serta trauma yang membekas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pemeriksaan dokumen yang relevan dan studi literatur. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai metode yang memiliki tujuan untuk mendiskripsikan apa yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau fakta. Dalam melakukan pengumpulan materi melalui proses penganalisisan serta pengamatan data dengan memanfaatkan verifikasi dan reduksi data termasuk juga ringkasan akhir. Penganalisisan dan pengamatan data disini dilakukan untuk memilah data yang sesuai, lalu dilakukanlah reduksi data, reduksi data disini berarti mencatat data yang telah melalui proses penganalisisan serta pengamatan dengan teliti, kemudian data tersebut

dirangkum sesuai dengan pokok yang dicari. Selanjutnya melakukan verifikasi data yang artinya data yang sudah ditampilkan atas dasar hasil dari penelitian tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia termasuk sebagai negara yang multikultural dengan berbagai etnis didalamnya. Untuk menjadi negara yang satu proses pembentukan negara Indonesia tidak terlepas dari rasa persatuan yang kuat dari berbagai kelompok etnis. Dengan adanya rasa senasib seperjuangan akibat kolonialisme membuat mereka ingin bersatu dan membentuk sebuah negara yang merdeka dengan didasari pada rasa nasionalisme. Setelah jatuhnya orde baru dibawah pimpinan Soeharto pada tahun 1998 memunculkan berbagai konflik lokal di Indonesia, seperti konflik etnis Melayu dengan Madura, konflik di Ambon yang dampaknya sangat merugikan. Konflik lokal yang terjadi di Indonesia pada saat itu tidak mudah untuk dimengerti karena setiap konflik memiliki penyebab yang berbeda-beda baik itu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dll (Hadi, 2007).

Diantara konflik yang muncul pada akhir masa orde baru yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya bagi sebagian masyarakat Indonesia salah satunya yaitu tentang konflik yang terjadi pada etnis Tionghoa di Jakarta. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa orde baru mengarah pada tindakan diskriminatif yang mana hal tersebut dapat dilihat dari pembatasan terhadap orang-orang etnis Tionghoa. Pembaharuan kebijakan yang dicanangkan malah mengarah pada unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang seharusnya suatu kebijakan itu membawa kearah yang baik, namun sebaliknya (Nurcahyo, 2016).

Masyarakat Indonesia jarang mendiskusikan kerusuhan yang terjadi pada etnis Tionghoa sebab dianggap sebagai topik sensitif, pasalnya hal itu berkaitan dengan politik pada masa orde baru. Pada tulisan Heryanto (2000) dan Roosa (2020) kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan sebuah kekejaman yang dipimpin oleh negara pada masa Orde Baru dan hal tersebut jarang dibicarakan dengan terbuka. Seperti yang diungkapkan (Syahri, 2009) pemerintah pada masa orde baru melakukan kontrol media masa, selain melakukan kontrol media masa pemerintah juga membungkam masyarakat yang sedang mengalami kritis kebijakan, bahkan sebesar 46% informasi yang dipublikasikan pada media masa adalah sumber yang berasal dari pemerintah. Jika hal tersebut demikian bagaimana kerusuhan yang terjadi pada etnis Tionghoa bisa terselesaikan secara bersih tanpa meninggalkan anggapan-anggapan yang kurang sesuai. Anggapan dan pandangan masyarakat masih terus berkembang sesuai apa yang mereka pikir tanpa melihat hal apa yang sebenarnya terjadi.

Latar Belakang Kerusuhan 1998 Terhadap Etnis Tionghoa di Jakarta

Krisis keuangan yang terjadi pada masa orde baru tidak lepas dari kebijakan serta strategi sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah. Ekonomi masa orde baru meninggalkan permasalahan yang memunculkan kesenjangan baik dalam lingkup ekonomi, sosial maupun politik. Saat itu kebijakan yang diberlakukan pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi dengan menekankan pada stabilitas dan tingkat pertumbuhan hingga lupa akan pemerataan yang seharusnya diperhatikan. Hal ini yang kemudian memunculkan ketimpangan dalam berbagai lingkup kehidupan (Ariadi & Sugiarto, 2003).

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak krisis moneter dunia. Lingkup

kehidupan paling terdampak akibat krisis moneter yaitu pada sektor ekonomi yang mana membuat nilai tukar rupiah turun. Hal ini membuat harga bahan pokok tidak stabil. Selain pada bidang ekonomi, yang terdampak dari adanya keadaan tersebut pada kehidupan sosial. Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan memunculkan banyaknya pengangguran, karena tidak memiliki pekerjaan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok yang berakibat pada kelaparan. Inilah yang memicu terjadinya konflik-konflik sosial muncul diberbagai daerah di Indonesia. Karena semakin kacanya ekonomi Indonesia yang dapat dilihat dari banyaknya pengangguran, harga bahan pokok yang semakin naik, memunculkan mahasiswa untuk mengadakan sebuah aksi-aksi sosial. Aksi yang dilakukan mahasiswa dianggap mengganggu keamanan dan stabilitas politik yang akhirnya membuat adanya bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Kerusuhan yang awalnya hanya ada di Jakarta merambat juga ke wilayah lain seperti di Medan, Solo, Surabaya, Pekanbaru, Yogyakarta (Baity & Adi, 2016). Seperti yang diungkapkan (Raz et al., 2013) sejak masuknya era globalisasi krisis keuangan lebih sering terjadi dari pada sebelumnya, sebabnya berakitan dengan perkembangan teknologi informasi yang membuat meluasnya kabar krisis keuangan yang terjadi pada suatu negara ke daerah atau wilayah lain. Termasuk juga negara Indonesia, akibat terjadinya krisis tersebut membuat tumbuhnya gejala ekonomi dan politik yang mengarah pada inflasi dan banyaknya pengangguran dan itu berimbas pada harga bahan pokok yang naik.

Disamping itu, ketika ketegangan politik semakin meningkat, munculah demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, mereka menginginkan rezim militer orde baru untuk diakhiri. Hal itu muncul akibat adanya rasa tidak puas dari masyarakat atas kepemimpinan pemerintahan Soeharto. Keinginan untuk Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden bukan hanya dari golongan mahasiswa saja, namun seluruh Indonesia menuntut supaya Soeharto bisa mundur, lalu bentuk penyuaaran tersebut diwakili oleh mahasiswa dengan melakukan demonstrasi yang dilakukan di gedung DPR/MPR RI. Hasil dari Gerakah Mahasiswa Trisakti ini berhasil mendorong Soeharto untuk menyerahkan jabatan sebagai Presiden Indonesia. Selain itu gerakan mahasiswa ini juga membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam lingkup pemerintahan maupun sosial (Jubaedah, 2019).

Sebelum akhirnya presiden Soeharto meletakkan jabatannya ada upaya yang pemerintah lakukan untuk menghadapi bentuk kemarahan rakyat yaitu dengan cara mengkambing hitamkan etnis Tionghoa. Sebelumnya ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu PP No 10 Tahun 1959 yang isinya tentang larangan orang-orang Tionghoa melakukan kegiatan perdagangan ke desa-desa karena mereka dianggap perusak ekonomi pribumi (Ekawati & Purwaningsih, 2015). Artinya pergerakan orang etnis Tionghoa sudah dibatasi sejak saat itu. Lalu anggapan bahwa orang-orang Tionghoa perusak ekonomi pribumi muncul karena saat itu orang Tionghoa berhasil dalam perekonomian perdagangan yang seolah mereka dapat mematikan perekonomian pribumi. Hal itu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengarahkan anggapan masyarakat bahwa rusaknya sistem ekonomi pemerintah akibat dari kegiatan perekonomian yang orang-orang etnis Tionghoa lakukan (Himawan et al., 2022).

Kerusuhan yang terjadi dalam menyuarakan tentang pelengseran jabatan Soeharto sebagai presiden bukan hanya demonstrasi yang dilakukan di gedung DPR/MPR RI, namun juga disasarkan pada orang-orang etnis Tionghoa di Jakarta. Perusakan fasilitas, penghancuran, penjarahan pada toko-toko dan rumah, hingga pemerkosaan pada perempuan beretnis Tionghoa mereka lakukan. Meskipun demonstrasi dalam hal politik dan ekonomi ditujukan

untuk menjatuhkan rezim militer orde baru, anggapan buruk atau prasangka terhadap orang-orang etnis Tionghoa menjadi anggapan utama dalam kerusuhan ini. Seperti yang diungkapkan (Purdey, 2006) kerusuhan pada Mei 1998 merupakan serangan yang telah direncanakan yang ditujukan pada orang-orang etnis Tionghoa. Apalagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa orde baru sangat kentara dalam mendiskriminasi orang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, kemudian mengarahkan pada stigma masyarakat agar anti-Tionghoa, dan membentuk anggapan bahwa orang-orang Tionghoa sebagai kambing hitam politik yang ikut serta dalam kekerasan yang terjadi.

Adanya ketidak rukunan antara masyarakat Indonesia dengan orang-orang etnis Tionghoa yang tinggal di Jakarta terus berlanjut. Anggapan-anggapan yang berkembang pada masyarakat sebenarnya bermula dari keberhasilan orang-orang etnis Tionghoa dalam hal perekonomian. Lalu menggiring pada stereotipe bahwa keberhasilan yang mereka capai dianggap sebagai suatu keserakahan yang mengarah pada eksploitatif. Stereotipe, diskriminasi sering menjadi awal tonggak munculnya kebencian. Hal tersebut terjadi kepada orang-orang etnis Tionghoa. Melihat etnis Tionghoa di Indonesia sebagai bagian dari kaum minoritas, pandangan stereotipe sering ditujukan kepada mereka. Keraguan masyarakat mayoritas terhadap orang-orang Tionghoa mengarah pada pandangan bahwa adanya keterlibatan etnis Tionghoa dalam perekonomian dan politik negara (Juditha, 2015).

Kuatnya perekonomian orang-orang Tionghoa pada masa itu bisa dilihat dari luasnya relasi yang dapat mereka lakukan hingga mampu bersaing dengan negara luar. Bahkan orang-orang Tionghoa mendominasi kedudukan sebagai konglomerat dibandingkan dengan orang pribumi. Padahal mereka sedang hidup dalam lingkup kebijakan ekonomi liberal namun mereka tetap bisa bertahan. Kebijakan yang pemerintah terapkan terkait dengan sistem ekonomi liberal tujuannya untuk memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Winarni (2014) mengungkapkan bahwa setelah Indonesia merdeka pada masa pemerintah orde lama presiden mengeluarkan sebuah kebijakan pribumisme. Kebijakan ini berlangsung dalam bidang ekonomi yang memiliki tujuan untuk melemahkan ekonomi orang-orang Tionghoa dan untuk membantu pedagang dari pribumi. Ada tokoh yang mengemukakan pendapatnya yaitu Mr. Aswat bahwa perekonomian harusnya dipegang oleh pribumi bukan orang asing, kemudian hal ini yang menggiring dibentuknya Gerakan Asaat. Gerakan ini bertujuan untuk melindungi perekonomian orang-orang pribumi dari persaingan perdagangan dengan orang asing terkhusus orang-orang Tionghoa. Namun dalam hal ini tidak berjalan dengan baik, orang-orang pribumi tidak mampu bersaing dengan orang-orang Tionghoa, karena mereka tidak memiliki kemampuan dalam hal perdagangan. Dari masa kolonial orang pribumi tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, dan kebanyakan orang pribumi memiliki kemampuan dalam hal bertani. Oleh karenanya untuk bersaing dengan orang Tionghoa yang mahir dalam melakukan perdagangan orang pribumi tidak bisa mengimbangi. Ini juga yang kemudian menggiring adanya rasa ketidaksukaan karena menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat kentara.

Keraguan masyarakat terhadap etnis Tionghoa semakin tumbuh yang dapat dilihat dari adanya relasi antara pengusaha Tionghoa dan penguasa Orde Baru. Hubungan yang terjalin antara pengusaha Tionghoa dengan presiden Soeharto dibarengi dengan kepentingan masing-masing. Bagi Presiden Soeharto relasi ini dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan sosial

Soeharto. Sedangkan untuk orang dari pengusaha Tionghoa sendiri relasi ini digunakan untuk mendapatkan keselamatan dari adanya sentimen anti-Tionghoa yang berkembang pada masyarakat. Dari sini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa orang-orang Tionghoa ada peran dalam pengaturan politik yang dijalankan Soeharto. Hal ini juga menjadi alasan mengapa anti-Tionghoa berkembang pada masyarakat dan rasa ketidaksukaan mereka pada etnis Tionghoa semakin tumbuh.

Selain itu, adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan asimilasi juga diberlakukan pada orang etnis Tionghoa. Keluarnya kebijakan tersebut tidak lepas dari adanya peristiwa G30S/PKI pada 1965. Kebijakan yang diperuntukan kepada orang-orang Tionghoa ini bersifat diskriminatif yang berpengaruh pada kehidupan mereka baik dalam bidang politik, sosial, serta budaya. Adapun bentuk diskriminatif yang dapat kita lihat seperti dibubarkannya organisasi berbau Tionghoa, kebijakan ganti nama, dan masih banyak lagi (Assidiqi, 2018). Kemudian muncul juga anggapan yang dipercaya oleh masyarakat terhadap orang-orang etnis Tionghoa di Jakarta bahwasanya mereka masih setia terhadap Tiongkok, yang menjadikan mereka cenderung memisahkan diri. Stereotipe ini sebenarnya yang menggiring masyarakat pada kebencian terhadap orang keturunan Tionghoa (Tan, 2008).

Menurut Purdey (2006) dalam kasus kerusuhan 1998 yang terjadi terhadap orang-orang etnis Tionghoa seperti kekerasan, pembunuhan tidak akan terjadi jika tidak dukung oleh kekuatan militer. Posisi orang Tionghoa sebagai kaum minoritas sering mendapatkan pengucilan dan kurangnya perlindungan dari pemerintah. Keterlibatan TNI dalam kejadian tersebut menjadi hambatan dalam penyelidikan pada kerusuhan 1998 di Jakarta. Setelah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh badan yang mengurus hak asasi manusia serta badan yang mengurus tentang kekerasan tidak lama dari itu tidak meneruskan atau mengusut tuntas kejadian tersebut. Pemerintah Indonesia juga tidak membantu dalam menyelidiki kasus tersebut. Kelambanan pemerintah dalam menangani kasus tersebut dapat dilihat dari tidak didatakannya jumlah korban yang terdampak secara resmi serta kerugian yang dirasakan akibat peristiwa itu, tidak adanya penyelidikan lebih mendalam pada pelaku yang terlibat dalam kerusuhan, dan yang paling miris adalah tidak adanya biaya kompensasi yang didapatkan korban ataupun orang yang terdampak kerusuhan 1998 dari pemerintah.

Kejadian Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta

Pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang terkumpul dalam Gerakan Mahasiswa Trisakti. Akibat demonstrasi tersebut kerusuhan terjadi dimana-mana, yang kemudian membuat adanya bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Bentrok yang terjadi antara mahasiswa dengan aparat keamanan meregang empat nyawa mahasiswa dari Universitas Trisakti. Kerusuhan semakin menjadi dan kondisi tidak dapat terkendali dengan baik. Ternyata kerusuhan tersebut berdampak bagi masyarakat Indonesia termasuk pula orang-orang dari etnis Tionghoa.

Pemerintah yang didukung oleh angkatan bersenjata yang kuat serta partai politik yang mendominasi menjadi sebuah senjata dalam mengurangi demokrasi masa orde baru. Kesenjangan sosial yang tidak terelakkan melingkupi kehidupan masyarakat pada saat itu. Pada masa orde baru strategi pembangunan lebih memusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang disasarkan oleh pemerintah lebih memfokuskan pada capaian pertumbuhan ekonomi, namun yang sangat disayangkan lupa akan pemerataan. Hal inilah yang

kemudian menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial (Ibrahim, 2017).

Kemudian kesenjangan yang semakin terlihat antara kelas atas dengan kelas bawah menyulut sebuah konflik yang kapan saja bisa terjadi. Puncak dari kerusuhan yang terjadi ada di Jakarta yaitu pada tanggal 13-15 Mei 1998, namun menjalar sampai ke daerah lain seperti kerusuhan yang ada di Solo, Yogyakarta, Pekanbaru, Surabaya, dll. Bentuk kerusuhan yang terjadi di Jakarta dengan orang-orang etnis Tionghoa sebagai sasaran dapat dilihat dari adanya penjarahan toko-toko milik orang Tionghoa, pembakaran, perusakan gedung, kantor, rumah-rumah, semua bangunan milik mereka diluluhlantakkan (Ginting et al., 2019). Kejadian ini sangat mencekam terkhusus bagi orang-orang Tionghoa sebagai korban sasaran masa. Banyak masyarakat yang tidak berani melakukan kegiatan diluar ruangan karena mereka lah subjek dari kerusuhan ini, apalagi kerusuhan ini didasari atas isu-isu anti-Tionghoa. Semua bangunan dihancurkan, bahkan dibakar semua rumah-rumah dijarah dan dirusak.

Selain itu yang paling miris adanya pemerkosaan massal pada perempuan-perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Bentuk pemerkosaan yang dilakukan ini termasuk sebagai suatu peristiwa yang sangat kompleks. Bisa dikatakan kompleks disini karena tidak hanya satu alasan yang menyebabkan meletusnya kejadian tersebut. Namun yang menjadi sorotan adalah adanya kekerasan struktural pada orang-orang Tionghoa. Dalam hal perekonomian orang-orang Tionghoa menduduki keadaan yang kuat, namun di keadaan sosial dan politik orang-orang Tionghoa lemah yang kemudian membangun bibit-bibit tumbuhnya sentimental terhadap orang-orang Tionghoa. Dengan adanya ideologi gender negara dalam memandang perempuan membuat situasi semakin kompleks dan rumit (Hikmawati, 2017).

Dampak Kerusuhan 1998 di Jakarta

Kerusuhan yang terjadi terhadap etnis Tionghoa di Jakarta pada tahun 1998 menjadi suatu tragedi yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah Indonesia. Pasalnya hal tersebut menimbulkan banyak kerugian terkhusus bagi orang-orang etnis Tionghoa. Tragedi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan bagi semua orang menjadi akibat dari *stereotype* yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Jakarta. Tidak dipungkiri peristiwa ini didasari dari berbagai alasan yang melatar belakangi, hingga pada akhirnya kejadian ini meletus pada 13-15 Mei 1998.

Kerusuhan 1998 menjadi insiden dalam serangkaian sejarah panjang pada masa pemerintahan Orde Baru. Kerusuhan yang berkaitan dengan politik ini menjadi topik sensitif yang jarang di ulas atau ditunjukkan kepada publik. Kurangnya penyelidikan yang dilakukan pemerintah secara mendalam terhadap kerusuhan 1998 menunjukkan bahwa pelaku, korban, saksi mata, motif kejadian, penyebab, serta akibat yang ditimbulkan semuanya tetap tertutup dan terus menjadi rahasia yang tidak akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat.

Peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat menjadi sebuah keresahan bagi masyarakat jika terus dibiarkan. Penindasan serta pembungkaman yang dilakukan pemerintah terhadap kerusuhan yang terjadi pada masyarakat bukanlah cara yang tepat, karena hal tersebut akan berdampak pada pelaku serta korban. Seperti yang diungkapkan (Winichakul, 2020) ketika masyarakat diam dan tidak bertindak atas kejadian peristiwa yang mereka alami, bukan berarti mereka akan lupa. Masyarakat akan terus mengingat dan tidak akan melupakan kejadian yang dialami. Akibat tidak adanya kesempatan bagi mereka untuk meluapkan apa yang mereka

rasakan, ataupun mendapatkan jawaban dari apa yang mereka pertanyakan mendorong untuk mencari cara untuk berbicara atau memilih untuk diam. Namun orang-orang Tionghoa dalam hal ini memilih untuk diam dengan tujuan menjaga diri agar aman. Adapun cara diam yang orang-orang Tionghoa lakukan akibat dari susahny mencari keadilan atas perlakuan kekerasan. Mereka menganggap mencari keadilan sebagai suatu hal yang mustahil dan rentan. Maka dari itu diam merupakan jalan yang mereka pilih dalam menghadapi hal demikian.

Trauma yang melekat pada orang-orang Tionghoa Indonesia yang paling menyedihkan yaitu terjadinya pemerkosaan massal secara brutal terhadap perempuan Tionghoa di Indonesia. Menurut (Yosia, 2020) puluhan ribu perempuan etnis Tionghoa mengalami trauma terhadap kerusuhan pada Mei 1998 dan mereka melakukan penyelamatan diri. Penyelamatan diri ini yang kemudian disebut *eksodus* yaitu meninggalkan tempat tinggal yaitu Jakarta oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia dalam skala besar-besaran. Terjadinya kerusuhan seperti penjarahan, pembunuhan, perusakan, pembakaran pada 1998 ternyata dibarengi juga dengan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa. Kebenaran akan kejadian tersebut masih terus dipertanyakan, pasalnya pemerintah menyangkal bahwa kerusuhan itu tidak dibarengi dengan pemerkosaan dengan alasan tidak adanya bukti konkret. Lalu yang terjadi pada korban yang benar-benar mengalami hal tersebut akan menjadi sebuah trauma yang membekas pada ingatannya. Adanya faktor-faktor yang membuat para korban enggan untuk melaporkan atas kejadian ini diantaranya yaitu kebingungan kemana korban akan melapor, korban tidak berani melakukan laporan kepada institusi berwajib karena akan terkait dengan para pelaku, adanya rasa takut dan malu atas apa yang mereka alami. Hal hal inilah yang membuat para investigasi kesulitan menentukan jumlah korban pasti atas kejadian pemerkosaan pada orang-orang etnis Tionghoa. Menurut (Hikmawati, 2017) pemerkosaan yang terjadi pada 1998 sebagai bentuk operasi berlapis akibat adanya kombinasi rasisme yang disasarkan pada orang-orang etnis Tionghoa.

Selain itu dampak yang dirasakan juga terjadi pada petukangan di Jakarta. Saat kerusuhan terjadi ada sekelompok orang yang melakukam perusakan bangunan yang kemudian disaat waktu yang bersamaan terdapat aksi mahasiswa melakukan demonstrasi. Semakin riuhnya suasana membuat orang-orang semakin brutal hingga melakukan perusakan toko-toko di sepanjang jalan raya. Yang menjadi perhatian ketika perusakan terjadi ada aparat keamanan yang berjaga di lokasi, namun tidak ada inisiatif untuk menghalau masa karena alasan jumlah antara massa dengan aparat keamanan yang tidak sepadan.

Penjarahan dan perusakan terus dilakukan dan toko-toko elektronik milik orang-orang Tionghoa menjadi salah satu sasarannya, Kerusuhan yang terjadi di wilayah petukangan di Jakarta dibarengi juga dengan sentimen rasial. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tulisan "Pribumi Asli" atau "Pribumi" pada toko-toko milik Tionghoa. Adapun tujuan dari dilakukannya hal tersebut yaitu untuk terhindar dari perusakan oleh massa. Namun hal itu tetap saja terjadi, perusakan, penjarahan, pembakaran tetap dilakukan walaupun bangunan milik orang Tionghoa sudah dituliskan "milik pribumi" (Hutahaeon, 2014). Kerusakan yang disebabkan atas kerusuhan itu berdampak pada para pengusaha petukangan. Kerugian yang dialami para pengusaha petukangan di Jakarta sangat dirasakan. Sebagian besar adalah pemilik toko dari orang-orang Tionghoa yang tokonya juga dijadikan sebagai tempat tinggal. Walaupun ada beberapa toko milik pribumi menjadi korban tapi sebagian besar adalah milik orang-orang Tionghoa. Akibat kerusuhan yang ditimbulkan dari perusakan bangunan, penjarahan toko,

pembakaran oleh massa, orang-orang Tionghoa harus memulai usahanya dari awal. Untuk membangun kembali usahanya mereka membutuhkan beberapa waktu dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan keuangan yang dimiliki. Atas kejadian ini orang-orang Tionghoa memilih untuk tidak meninggalkan wilayahnya, melainkan mereka tetap tinggal di kawasan petukangan untuk memulai usahanya kembali dari awal. Modal yang mereka gunakan untuk membangun kembali usahanya dengan menggunakan uang hasil penjualan yang sebelumnya mereka dapatkan, tabungan yang mereka miliki atau dengan melakukan peminjaman. Selain itu letak wilayah petukangan yang strategis menumbuhkan keyakinan bahwa mereka tetap bisa bertahan dan membangun kembali usahanya menjadi seperti semula. Hal inilah yang membuktikan bahwa para pengusaha Tionghoa bisa bertahan walaupun kerusakan yang terjadi saat itu sangat merugikan mereka. Kemudian adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang ditujukan kepada orang-orang Tionghoa pada masa orde baru membuat adanya diskriminasi kehidupan bersosial. Kebijakan seperti adanya asimilasi dengan tujuan untuk menghilangkan identitas asli orang-orang etnis Tionghoa, pembatasan untuk melakukan perdagangan bagi etnis Tionghoa, dll. Pada akhirnya kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut mempersulit kehidupan orang-orang Tionghoa apalagi jika membahas mengenai kebebasan, itu sulit didapatkan karena adanya pembatasan gerak bagi orang Tionghoa (Fitrya et al., 2013).

Keberhasilan orang Tionghoa dalam hal perekonomian dianggap menjadi ancaman bagi orang-orang pribumi. Seperti yang diungkapkan (Gunawan, 2020) munculnya kebencian terhadap orang-orang etnis Tionghoa karena adanya adu domba dan rasa iri yang muncul sejak masa kolonial berlangsung di Indonesia. Itu artinya diskriminasi sudah berakar dari sejak lama, lalu ditambah dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diperuntukan orang etnis Tionghoa masa pemerintahan orde baru membuat diskriminasi itu semakin terlihat. Munculnya anti-Tionghoa dan anggapan buruk sudah terjadi sejak jaman dahulu, namun sayangnya hal tersebut masih terjadi sampai saat ini.

Kesimpulan

Kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada tahun 1998 menjadi sebuah peristiwa sejarah yang sangat kelam. Pasalnya dalam peristiwa tersebut banyak yang mengalami kerugian baik kerugian secara fisik, materi, maupun psikologis. Kerusakan yang secara tidak langsung dimanfaatkan bagi sebagian kalangan untuk kepentingan politik menimbulkan adanya anti-Tionghoa yang berkembang pada kehidupan bermasyarakat. Seperti yang disebutkan (Himawan et al., 2022) dalam menanggapi masalah tersebut pemerintah memilih untuk diam entah untuk melindungi para pelaku yang terlibat atau supaya pelaku terbebas dari hukuman. Pembungkaman terhadap peristiwa ini ditunjukkan dengan tidak adanya penyelidikan lebih lanjut yang berkaitan dengan berapa jumlah pasti yang terdampak, siapa pelaku dibalik kerusakan ini, bahkan keadilan maupun ganti rugi yang seharusnya didapatkan tidak ada yang mengungkap.

Perempuan etnis Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan massal sampai detik ini tidak tahu menahu siapa pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Tidak adanya perlindungan atau semacamnya yang dilakukan pemerintah dalam membela para perempuan Tionghoa di Indonesia. Walaupun saat itu dibentuk Tim Gabungan Penyelidik Fakta (TGPF), laporan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) yang

membantu dalam melakukan penyelidikan untuk memperoleh data di lapangan, namun hasil akhir yang didapatkan dalam proses penyelidikan tidak dilakukan secara mendalam dan terbengkalai. Sampai saat ini pun para pelaku tidak dilakukan tindakan hukum atau semacamnya karena penyelidikan mendalam tidak dilakukan. Waktu terus berjalan dan peristiwa itu lambat laun terlupakan, tapi bagaimana dengan para korban. Mereka tidak mendapatkan ganti rugi atau mendapat keadilan, yang mereka dapatkan hanyalah ingatan kelam yang membuat enggan untuk mengingat ulang akan kejadian yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa.

Bagi para petukang di Jakarta yang juga terdampak atas peristiwa kerusuhan 1998 menjadi sebuah peristiwa yang menimbulkan kerugian berupa materi. Akibat perusakan bangunan, pembakaran, penjarahan yang dilakukan massa membuat toko-toko yang dijadikan sebagai tempat usaha sekaligus menjadi tempat tinggal mereka tidak bisa diselamatkan. Kerugian ini berpengaruh pada kehidupan para pengusaha Tionghoa karena usaha yang mereka lakukan kebanyakan melakukan perdagangan membuat mereka mau tidak mau untuk memulai semuanya dari awal. Walaupun begitu orang-orang Tionghoa masih bisa bertahan dalam menghadapi kejadian ini. Meskipun kerugian yang didapatkan atas kerusuhan 1998 tidak bisa terhitung besarnya, namun mereka berusaha tetap bertahan dan memilih untuk memulainya dari awal. Hal itu dibuktikan dengan kembalinya usaha petukangan orang-orang Tionghoa di Jakarta.

Tragedi ini menjadi tragedi yang paling memilukan bagi orang-orang etnis Tionghoa di Indonesia. Pasalnya ingatan para korban akan kejadian tersebut terus melekat sampai kapanpun. Sejarah kelam itu menjadi trauma sendiri bagi para terdampak. Tidak mudah untuk membicarakan sejarah yang di dalamnya penuh dengan kejadian yang kompleks, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, perusakan bangunan, gedung-gedung milik orang-orang Tionghoa. Tidak ada yang tahu siapa pelaku dibalik kerusuhan ini, tidak ada bentuk tanggung jawab ataupun ganti rugi yang diberikan, keadilan juga tidak didapatkan terutama bagi perempuan Tionghoa yang menjadi korban. Lalu anggapan-anggapan negatif yang ditujukan kepada mereka masih melekat sampai sekarang walaupun itu hanya sebagian kecil, bahkan mereka sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang nasionalisme terhadap negara sudah tidak perlu untuk dipertanyakan.

Referensi

- Annisa, B. (2011). *Kerusuhan Mei 1998 (Studi Deskriminasi Etnis Cina di Jakarta Timur)* [Universitas Negeri Malang]. <http://repository.um.ac.id/id/eprint/55082>
- Ariadi, N. E., & Sugiarto, D. (2003). STUDI SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI SISTEM EKONOMI ALTERNATIF (Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru). *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(1), 23–46. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i1.190>
- Assidiqi, H. (2018). Kebijakan Asimilasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jakarta Tahun 1966-1998. *Prodi Ilmu Sejarah*, 3(3), 375–388.
- Baity, A. N., & Adi, A. S. (2016). Persepsi Aktivis Mahasiswa 1998 Tentang Demonstrasi Tahun 1998 Dalam Rangka Menurunkan Soeharto. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 03(04), 1675–1690.

- Ekawati, D., & Purwaningsih, S. M. (2015). Hak Asasi Manusia Etnis Tionghoa dalam karya Pramoedya Hoakiau Indonesia. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 3 (1)(1), 58–68.
- Fitrya, L., Sejarah, J. P., Sosial, F. I., Sejarah, J. P., & Sosial, F. I. (2013). *TIONGHOA DALAM DISKRIMINASI ORDE BARU TAHUN 1967-2000*. 1(2), 159–166.
- Ginting, S., Syaiful, M., & Ekwandari, Y. (2019). Etnis Tionghoa pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 7(5).
- Gunawan, N. (2020). *Kebencian dan Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia*. Hima Pendidikan Sejarah FIS UNY.
- Hadi, S. (2007). *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hikmawati, C. L. (2017). Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. *Jurnal Politik*, 2(2), 337. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.76>
- Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the May 1998 Riots in Indonesia: Civilians and Their Untold Memories. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(May 1998), 240–257. <https://doi.org/10.1177/18681034221084320>
- Hutahaean, J. (2014). Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003. *Journal of Indonesian History*, 3(1), 27–33.
- I.S. Susanto. (1999). *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*.
- Ibrahim, H. R. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40(55), 6305–6328.
- Jubaedah, S. (2019). Gerakan Mahasiswa (Kajian Tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti Pada Mei 1998 Dalam Proses Pergantian Kekuasaan Orde Baru). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 18–40. <https://doi.org/10.36706/jc.v8i2.9245>
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12(1), 87–104. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.445>
- Kumala, G., Setiawan, K., & Mariati, M. (2022). Perancangan Visual Media Promosi Festival Agen Perubahan Indonesia 3: Peran Etnis Tionghoa dalam Sejarah Perang Nusantara. *Rupaka*, 3 (2).
- Nurchahyo, D. A. (2016). *KEBIJAKAN ORDE BARU TERHADAP ETNIS TIONGHOA*.
- Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996–1999*. University of Hawaii Press.
- Raz, A. F., Indra, T. P. ., & Artikasih, D. K. (2013). Bulletin of Monetary Economics and Banking KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 15 (2)(2), 37–56. <https://doi.org/10.21098/bemp.v15i2>
- Syahri, M. (2009). Intervensi Pemerintah terhadap Kebebasan Pers dan Munculnya Eufemisme. *Bahasa Dan Sastra Indonesia (Jurnal)*, March 2002, 0–11.

https://www.researchgate.net/profile/Moch_Syahri/publication/315619685_INTERVENSI_PEMERINTAH_TERHADAP_KEBEBASAN_PERS_DAN_MUNCULNYA_EUFIMISME/links/58d61dd992851c44d4698128/INTERVENSI-PEMERINTAH-TERHADAP-KEBEBASAN-PERS-DAN-MUNCULNYA-EUFIMISME.pdf

Tan, M. G. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Yayasan Obor Indonesia.

Winarni, N. H. dan R. (2014). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik Sosial Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama sampai Zaman Reformasi pada tahun 1998-2012. *Publika Budaya*, 2(2), 19–31. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/1506/1235>

Winichakul, T. (2020). *Moment of Silence: The Unforgetting of the 1976 Massacre in Bangkok*. University of Hawaii Press.

Yosia, A. (2020). Suatu Usulan Heuristik Lintasan Berteologi dalam Konteks Bagi Kaum Tionghoa-Injili Indonesia Lewat Kacamata Interseksionalitas. *Indonesian Journal of Theology*, 8(2), 198–230.